

EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR KELURAHAN BATU LAYANG KECAMATAN PONTIANAK UTARA

Oleh :

EMILIANA YULIDA ^{1*}

E1012151067

Dr. H. Martoyo, MA ², Dr. Ira Patriani, S. IP, M. Si ²

*Email: emilianayulida04@gmail.com

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang terletak di Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara. Permasalahan ini cukup menarik untuk diteliti, mengingat pengelolaan sampah dalam menangani sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir Kelurahan Batu Layang masih belum optimal. Berdasarkan kriteria, yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsitas. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu eksploratif kualitatif. Objek penelitian berada di TPA Batu Layang yang merupakan tempat terakhir bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan sampah di kota Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan sampah, belum diterapkan sesuai dengan aturan dan belum memenuhi kriteria efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsitas. Volume sampah yang masuk ke TPA belum ditangani dengan benar dikarenakan kurangnya anggaran yang disediakan dalam menangani sampah, sarana dan prasarana yang kurang memadai, keterbatasan ahli teknis, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah. Untuk pemerintah Kota Pontianak diharapkan melakukan sosialisasi pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah berdasarkan SOP seperti pengelolaan sampah berbasis masyarakat (3R) untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA, menambah tenaga ahli teknis dalam menangani sampah, menerapkan peraturan mengenai keikutsertaan publik dalam mengelola sampah dan lebih dioptimalkan jadwal pembuangan sampah sesuai dengan peraturan yang ada.

Kata Kunci : kebijakan, kriteria evaluasi, pengelolaan sampah.

**THE EVALUATION OF WASTEMANAGEMENT IN LANDFILLS OF
KELURAHAN BATU LAYANG, NORTH PONTIANAK SUB-DISTRICT**

By
EMILIANA YULIDA^{1*}
E1012151067

Dr. H. Martoyo, MA², Dr. Ira Patriani, S. IP, M. Si

*Email: emilianayulida04@gmail.com

1. Student at Public Administration Study Program, faculty of Social and Political Science, Universitas Tanjungpura
2. Lecture at Public Administration Study Program, Social and Political Science, Universitas Tanjungpura

ABSTRACT

This research tries to evaluate the regulation of waste management landfills of Kelurahan Batu Layang, North Pontianak Sub-district. This issue is quite interesting since waste management in the landfill was not carried out optimally. According to the criteria of effectiveness, efficiency, adequacy, equality, and responsiveness, this research recommends some actions that can be undertaken by Environmental Office of Pontianak City in managing their waste in the landfills. The research employed an exploratory qualitative method. The object was located in the final place of waste disposal in Pontianak. The results indicated that waste management was not yet carried out in accordance with the criteria of effectiveness, efficiency, adequacy, equality, and responsiveness. The volume of waste coming to the landfills was not managed carefully as a result of some reasons. Some of them included a lack of budget, facilities, infrastructures, technical experts, and people's awareness of waste management. The government was expected to conduct a socialisation focusing on the importance of the community's participation in managing the waste. The waste can be managed by community-based waste management (3R) to reduce the volume of waste entering the landfills. In addition, the government may add the number of technical experts to overcome the issue, apply regulations that encourage the community's participation, and optimise the schedule of waste disposal according to the complied regulation.

Keywords: Regulation, Evaluation Criteria, waste management

A. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan penduduk yang terjadi di Indonesia cukup pesat, bukan hanya terjadi dikota-kota besar, bahkan diperdesaan pun mengalami pertumbuhan penduduk. Walaupun tidak sepesat kota-kota besar yang terkait dengan industri, pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap jumlah timbulan sampah setiap tahunnya.

Sampah menjadi masalah yang cukup kompleks yang dihadapi oleh banyak kota di Indonesia. Sampah bisa menimbulkan berbagai masalah yang terkait dengan masalah ekonomi, lingkungan sosial dan lain sebagainya jika tidak diatasi dengan baik. Salah satunya kota Pontianak, yang tidak terlepas dari permasalahan sampah karena pertumbuhan penduduk yang pesat, sehingga berdampak pada volume sampah yang meningkat setiap tahunnya. Kota Pontianak merupakan salah satu kota diprovinsi Kalimantan Barat yang memiliki penduduk dengan jumlah 655.432 jiwa.

Sebuah Kota yang cukup padat penduduk nya, sehingga rata-rata jumlah sampah yang dihasilkan 2,75 Liter per orang dalam sehari. Dalam sehari timbulan sampah bisa mencapai 300 - 400 Ton per hari, sekitar 1.593 m³ atau setara dengan 358 ton per hari yang harus diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Dengan tujuan mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang rasional, proposional, efektif dan efisien dalam tata kerja yang jelas pada bidang lingkungan hidup penyelenggara pemerintah Kota Pontianak dibidang lingkungan dan kehutanan menjadi kewenangan Daerah. Adapun landasan hukum melalui Peraturan Walikota Pontianak Nomor 61 Tahun 2016 yang dibuat oleh Pemerintah Kota Pontianak, dengan upaya mampu mengatasi masalah Pengelolaan sampah yang terdapat di TPA Kelurahan Batu Layang

Dalam mengimplementasikan kebijakan terjadi permasalahan, Pelayanan pengelolaan sampah yang telah dilakukan dengan baik oleh

Pemerintah Kota Pontianak ternyata belum diimbangi dengan kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi menjaga lingkungan agar tetap bersih. Kurangnya sarana dan prasarana, kerusakan alat yang menyebabkan keterlambatan dalam mengangkut sampah di TPS, Masih banyak masyarakat yang melanggar jadwal pembuangan sampah yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 6 tahun 2006, menjadi hambatan tidak optimalnya pengelolaan sampah yang masuk ke TPA Batu Layang Kecamatan Pontianak. TPA Batu Layang menunjukkan bahwa sejumlah pemulung yang memilah sampah sebagai rutinitas hariannya menunjukkan bahwa sebenarnya sampah yang masuk ke TPS/Transfer Depo maupun TPA Batu Layang sebearnya berpotensi untuk dipilah juga dikurangi.

Oleh Karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan memilih judul “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas, identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Pengaruh jumlah peningkatan penduduk terhadap timbulan sampah sejak tahun 2015 sampai tahun 2017
2. Keterbatasan dana untuk kepentingan pengelolaan sampah.
3. kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi menjaga lingkungan agar tetap bersih.
4. Kurangnya SDM yang mengelola sampah untuk volume sampah yang cukup besar, sehingga melebihi dari jumlah muatan daya tampung (TPA).
5. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk mengelola sampah dikota Pontianak

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka pembatasan masalah diatas adalah evaluasi kebijakan Pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitiannya yaitu “Mengapa

kebijakan pengelolaan sampah di TPA Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara belum berjalan optimal?"

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka mendorong peneliti untuk mengkaji dan memperoleh pemahaman mengapa kebijakan pengelolaan sampah di TPA Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara belum berjalan optimal.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Penelitian Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian yang lebih mendalam pada pengembangan ilmu administrasi publik lebih khusus lagi yang berkaitan dengan kebijakan publik.

2. Penelitian Praktis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah kota Pontianak khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak dalam pengelolaan sampah di TPA Batu Layng Kota Pontianak, dalam menangani masalah ini demi terwujudnya peraturan pengelolaan sampah yang bertujuan untuk melestarikan

lingkungan hidup masyarakat dan menjadikan sampah sebagai sumber daya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 61 Tahun 2016.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Evaluasi Kebijakan

Setiap kebijakan memerlukan langka-langkah dalam mencapai tujuan, kebijakan juga dilihat sebagai sebuah pola kegiatan yang susunan nya teratur sebagai langkah dari pelaksanaan fungsi evaluasi dalam kebijakan publik. Evaluasi dapat diartikan sebagai skala nilai atau rating, dan penilaian terhadap hasil dari sebuah kebijakan ataupun program.

Menurut Dunn (2016:608) evaluasi kebijakan merupakan sebuah gambaran bahwa dari pelaksanaan dinilai berdasarkan informasi yang diterima dan diperoleh langsung di lapangan. Namun sebenarnya evaluasi memiliki fungsi bukan hanya dalam bentuk penilaian terhadap kebijakan melainkan melihat tingkat kinerja, pencapaian tujuan dan sasaran, mengetahui pemanfaat dan dana yang digunakan oleh suatu kebijakan

serta mengukur dampak suatu kebijakan. Adapun penelitian ini berkaitan dengan rumusan pertanyaan dengan pendekatan kriteria evaluasi kebijakan menurut Dunn (1960 :2003), adapun kriteria evaluasi kebijakannya sebagai berikut:

1. Efektivitas

efektivitas berkenaan dengan kebijakan itu mampu mencapai tujuannya pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, dan sejauh mana kualitas dan perkembangan dari kebijakan yang dilaksanakan tersebut mampu berjalan secara optimal.

2. Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan usaha yang dilakukan dalam mencapai hasil yang diinginkan. Dengan penggunaan sumberdaya secara optimal agar tercapainya tujuan kebijakan.

3. Kecukupan

Kecukupan masih berkaitan dengan efektivitas, seberapa jauh alternatif yang dibuat, diprediksi mampu memuaskan kebutuhan, nilai dan kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan

yang terjadi baik dalam biaya tetap dan efektivitas tetap.

4. Pemerataan

suatu kebijakan bisa saja berjalan efektif dan efisien serta mencukupi apabila biaya dan manfaat merata. Artinya sebuah kebijakan yang dibuat didistribusikan dengan adil dan wajar.

5. Responsivitas

sejauh mana suatu keberhasilan kebijakan mampu memuaskan kebutuhan masyarakat dan bagaimana respon atau tanggapan dari masyarakat itu sendiri terhadap pelaksanaan kebijakan dan memprediksikan pengaruh yang terjadi apabila sebuah kebijakan akan dilaksanakan dan tanggapan yang diberikan masyarakat positif (memberi dukungan) atau negatif (memberi penolakan).

6. Ketepatan

Ketepatan artinya puncak dari indikator dalam menentukan keberhasilan kebijakan, baik dampak yang tidak diduga sebelumnya yang bersifat positif atau pun negatif dan alternatif lain

yang mampu dirasakan lebih baik dari sebuah pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan mampu bergerak secara sistematis dan dinamis.

Pengelolaan Sampah

Menurut Perda Kota Pontianak Nomor 16 tahun 2015 pasal (1) ayat 53, sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang berbentuk padat. terdiri dari sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga. Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa sampah adalah sisa bekas kegiatan manusia yang sudah tidak digunakan lagi.

Oleh karena itu, timbunan sampah perlu dikurangi dengan pengelolaan sampah yang tepat dan benar. Supaya tidak mengakibatkan dampak buruk serta merugikan lingkungan dan kehidupan masyarakat karena pencemaran yang berasal dari sampah..

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode eksploratif kualitatif. Peneliti akan menggali

informasi lebih jauh. Sifat dari penelitian ini adalah kreatif, fleksibel, terbuka, dan semua sumber dianggap penting sebagai sumber informasi, dalam mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di TPA Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara, adapun penulis mempertimbangkan untuk memilih lokasi penelitian tersebut yaitu dampak kebijakan pengelolaan sampah yang terdapat di TPA Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara, belum berjalan seperti yang diharapkan sesuai ketentuan dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh sebab itu, perlu disoroti secara khusus permasalahan mengenai pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara. Waktu penelitian ini dilaksanakan dari bulan maret 2019.

3. Subjek Penelitian

Adapun sumber data /informan dalam penelitian ini yaitu : Kabid. Revitalisasi. Lingk. dan Pengembangan Kapasitas (RLPK), Kepala UPTD TPA Batu Layang, Kasi Sarana Angkutan Dinas Lingkungan Hidup, Petugas Angkutan sampah, Seksi Operasional kebersihan TPA Batu Layang, Penjaga TPS Pasar Puring, dan empat orang yang tinggal sekitar TPA Batu Layang. Data yang di kumpulkan dalam penelitian ini yaitu data seperti gambar, tulisan dan data angka.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik Pengumpulan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Bungin (2013 : 142) observasi atau pengamatan merupakan kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebaifai alat bantu utamanya selain pancaindera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit.

2. Wawancara

Menurut Bungin (2013 : 142), menyatakan wawancara adalah proses memperoleh keterangan, untuk tujuan penelitian. Dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden, atau orang yang diwawancarai. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistik dan jelas dari informan.

3. Dokumentasi

Menurut Bungin (2013 : 153) metode dokumenter Merupakan salah satu metode pengumpulan data, yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya, metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia berbentuk: surat-surat, catatan harian, laporan dokumen, pemerintah maupun perusahaan swasta, foto, video dan lain sebagainya.

5. Instrumen / Alat Pengumpulan data

instrumen kunci dalam penelitian untuk memperoleh data yang terdapat dilapangan yaitu:

1. Pedoman Observasi

Merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi bisa juga dapat dilakukan dalam bentuk observasi sistematis dalam bentuk survei maupun analisis dokumen.

2. Pedoman Wawancara

Merupakan sebuah alat untuk mengumpulkan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disediakan yang bersifat sistematis dan berkaitan dengan masalah penelitian dan pertanyaan tersebut harus dijawab langsung oleh responden baik secara kebetulan maupun yang sudah ditentukan jumlahnya.

3. Catatan Dokumentasi

Yaitu sebagai bentuk daftar lampiran yang didapat dari hasil rekaman, tape recorder, kamera, fotocopy dan lain sebagainya tergantung peneliti untuk menggunakannya.

6. Teknik Analisis Data

Data yang didapat melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi di lapangan. Data yang telah terkumpul, kemudian disajikan dalam bentuk kalimat dan ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban untuk masalah penelitian yang dilaksanakan.

7. Keabsahan Data

Sedangkan yang digunakan adalah teknik penelitian eksploratif Kualitatif dengan menggunakan keabsahan data Triangulasi Sumber dan triangulasi data

D. PEMBAHASAN

Menurut hasil penelitian yang dilakukan dilapangan, dalam melakukan wawancara terhadap 10 informan mengenai pengelolaan sampah di TPA Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara. Maka dapat disimpulkan dengan pendekatan kriteria menurut Dunn (610 : 2003) sebagai berikut:

1. Efektivitas

William N. Dunn menyatakan bahwa Efektivitas berkaitan dengan apakah alternatif-alternatif suatu kebijakan mencapai hasil dan tujuan

yang diinginkan sudah tercapai. Berdasarkan tindakan yang dilakukan. Efektivitas juga berkaitan dengan waktu yang sudah ditetapkan. yang artinya apakah dalam melaksanakan tugas yang sudah ditentukan tersebut sudah baik atau belum, waktu yang dibutuhkan dalam mencapai tercapainya kebijakan yang tergantung pada tugas tersebut, sudah diselesaikan atau belum.

Adapun efektivitas dari kebijakan pengelolaan sampah di TPA Batu Layang, masih belum optimal. Masih terdapat keterlambatan pengangkutan sampah, dikarenakan kekurangan armada, seperti mobil pengangkutan sampah yang rusak. Teknik pengelolaan sampah yang masih menggunakan Open Dumping. Dan sudah seharusnya menggunakan teknik Sanitary landfill untuk penanganan volume sampah yang masuk ke Tpa Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara.

2. Efisiensi

Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi yang merupakan hubungan antara

efektifitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Dapat disimpulkan bahwa untuk menjalankan efektivitas sebuah kebijakan, perlu adanya dukungan dari efisiensi. Kebijakan efektif apabila dalam mencapai tujuan tersebut dapat melakukan penghematan dan meminimalisir dana dalam pelaksanaan kebijakan.

Dari kebijakan pengelolaan sampah terhadap pengelolaan sampah di TPA Batu Layang belum efisien dilaksanakan. Hal ini dikarenakan biaya yang dikeluarkan masih terbatas baik dari ketersediaan jumlah angkutan, sumber daya manusia yang masih kurang, dalam penanganan sampah di TPA.

3. Kecukupan

kecukupan merupakan salah satu kriteria yang bisa digunakan dalam menilai sebuah kinerja apakah sudah berjalan maksimal dan efektif sesuai dengan tujuan dari sebuah kebijakan dan program. disimpulkan kecukupan erat kaitan nya dengan efektivitas, yang bisa menjadi tolak ukur dan memprediksi, seberapa jauh alternatif yang ada bisa memuaskan kebutuhan,

nilai atau kesempatan dalam meliputi biaya tetap dan efektivitas yang berubah dari kebijakan dengan tujuannya memaksimalkan efektivitas pada batas risorsis yang tersedia.

Dari kebijakan pengelolaan sampah terhadap pengelolaan sampah di TPA Batu Layang, berdasarkan pada kondisi sampah yang tercampur aduk, kondisi kekurangan SDM membuat pengelolaan sampah menjadi rumit, sehingga membutuhkan SDM yang membuat lebih banyak dana yng harus dikeluarkan dan masyarakat sering melanggar jadwal pembuangan sampah, walaupun sudah diberi hukuman, namun tidak menimbulkan efek jera bagi masyarakat.

4. Pemerataan

Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan, artinya sebuah kebijakan yang dibuat didistribusikan dengan adil dan wajar. Adapun pemerataan dari kebijakan pengelolaan sampah ini. Sudah diterapkan pengelolaan sampah sudah sesuai. Terutama penempatan pembuangan sampah (TPS) secara merata di Kota

Pontianak. Berdasarkan keluhan dan pengaduan masyarakat. Namun ternyata solusi dari penempatan dan pemindahan TPS sering mengalami pro dan kontra dari masyarakat.

Pemindahan TPS dilakukan karena pelaporan mengenai bau yang tidak sedap dari TPS, namun setelah dilakukan pemindahan, rupanya sebagian masyarakat mengeluh karena harus membuang sampah ketempat yang lebih jauh.

5. Responsivitas

Responsivitas merupakan salah satu kriteria dalam mengevaluasi kebijakan. Menurut Dunn (2003) responsivitas ialah penilaian terhadap *responsiviness* ditujukan untuk mengetahui hasil rencana/ kegiatan/ kebijaksanaan sesuai dengan preferensi/ keinginan dari target grup. Responsivitas bukan hanya bercerita tentang terpenuhinya kebutuhan yang ingin dicapai. Tetapi juga berkaitan dengan tanggapan-tanggapan untuk mendengarkan dari segi keluhan, pengaduan bahkan penilaian yang baik.

Responsivitas pada kebijakan pengelolaan sampah di TPA Batu

Layang Kecamatan Pontianak Utara, dapat dilihat ada banyak aksi protes yang dilakukan masyarakat yang tinggal dekat TPA, apabila sampah di TPA tidak dapat diatasi dan mengganggu aktivitas masyarakat, aksi yang dilakukan masyarakat yaitu pemblokiran jalan. Namun sebagian masyarakat merasa bahwa dengan keberadaan TPA juga menguntungkan bagi PHL dapat mengumpulkan barang bekas yang dapat dijual kembali. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menangani dan mengurangi sampah sebenarnya tidak terlepas dengan belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam memberikan motivasi dan sosialisasi atas peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pada bab ini peneliti akan menguraikan hasil dari uraian pembahasan dengan menarik kesimpulan berdasarkan kriteria evaluasi menurut William N. Dunn (610 :2003). Berdasarkan fokus penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Pengelolaan Sampah yang diatur

dalam Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Dalam mengelola sampah di TPA Batu Layang sebagai berikut:

1. Efektivitas

Masih belum optimal, dikarenakan jumlah pengelola sampah dan ketersediaan sarana dan prasarana tidak sebanding dengan volume sampah yang banyak. Sering terjadi keterlambatan pengangkutan sampah di TPS, kemudian teknik dalam pengelolaan sampah di TPA Batu Layang masih menggunakan Teknik sederhana *Open Dumping*.

2. Efisiensi

Belum cukup baik, karena dana yang disediakan masih terbatas sehingga tidak bisa memenuhi sarana dan prasarana, penambahan SDM, dan mengganti teknik yang lebih baik untuk pengelolaan sampah di TPA Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara.

3. Kecukupan

Masih belum cukup baik, terutama pada kondisi sampah yang tercampur aduk, kondisi kekurangan SDM membuat pengelolaan sampah menjadi rumit, sehingga membutuhkan SDM yang membuat lebih banyak dana yang harus dikeluarkan dan masyarakat sering melanggar jadwal pembuangan sampah, walaupun sudah diberi hukuman, namun tidak menimbulkan efek jera bagi masyarakat.

4. Pemerataan

Pemerataan sudah cukup baik walaupun penempatan dan pemindahan TPS sering mengalami pro dan kontra dari masyarakat. Pemindahan TPS dilakukan karena pelaporan mengenai bau yang tidak sedap dari TPS, namun setelah dilakukan pemindahan, rupanya sebagian masyarakat mengeluh karena harus membuang sampah ketempat yang lebih jauh.

5. Responsivitas

Masih belum optimal, terutama kurangnya partisipasi masyarakat pentingnya pengelolaan sampah dari sumbernya. Keberadaan TPA seperti mengalami penolakan dari

masyarakat akibat pencemaran dan penanganan sampah belum dapat ditangani dengan baik.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka disarankan bagi Dinas Lingkungan Hidup, Kota Pontianak untuk:

1. Meningkatkan efektivitas dalam bentuk menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan yang dibutuhkan untuk pengelolaan sampah supaya sampah tidak lagi menumpuk di TPS, dikarenakan keterlambatan pengangkutan. Melakukan teknik pengelolaan sampah yang lebih modern seperti *sanitary landfill* untuk menangani jumlah volume sampah yang masuk ke TPA Batu Layang.
2. Meningkatkan efisiensi dengan upaya mengoptimalkan biaya retribusi sampah dalam pelayanan persampahan di kota Pontianak.
3. Meningkatkan kecukupan dalam bentuk membangun

bank sampah sesuai jenis sampah, dan melakukan sosialisasi lebih sering, mengenai pentingnya bagi masyarakat untuk mematuhi peraturan mengenai jadwal pembuangan sampah.

4. Meningkatkan pemerataan dengan upaya melakukan perbandingan mengenai pro dan kontra terhadap penempatan maupun pemindahan TPS agar dievaluasi supaya tidak menjadi masalah lagi untuk kedepannya.
5. Meningkatkan responsivitas dengan, memberikan pengetahuan dan pentingnya partisipasi masyarakat disetiap kecamatan dalam pengelolaan sampah yang benar sesuai dengan SOP kebijakan,

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur penelitian :suatu pendekatan*

praktek. Jakarta: Rineka Cipta

Badan Standarisasi Nasional (BSN), 1991, *Standar Nasional Indonesia (SNI) S –04 – 1991 – 03 tentang Spesifikasi Timbulan sampah untuk kota kecil dan kota sedang di Indonesia*, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta

Badan Standarisasi Nasional (BSN), 1992, *Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-2454-1992 tentang Tata cara Pengelolaan Teknik Sampah Perkotaan*, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta

Badan Standarisasi Nasional (BSN), 1994, *Standar Nasional Indonesia (SNI),1994, SIN 03-3241-1994, tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah*, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.

Badan Standarisasi Nasional (BSN), 1994, *Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-3964-1994 tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh*

- Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan*, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana
- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Dengo, Andirman Juhra Florence Daicy Lengkong Salmin. 2019. *Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Di Kota Manado*. Diakses 12 Agustus 2019. Pada <http://ejournal.unsrat.ac.id/file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/19750-40033-1-SM.pdf>
- Dewi, Rahayu Kusuma. 2016. *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: Pustaka Setia
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Masa University Press
- Faizah. 2008. *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Tesis
- Idrus, muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga
- Khasanah, Nur. 2017 “ Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.” Skripsi Universitas Tanjungpura.
- Mulyadi, Dedi. 2016. *Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Nopiyuningtias. 2017. “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kantor Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Landak.” Skripsi Universitas Tanjungpura.
- Sarlita. 2017. “Evaluasi Implementasi Kebijakan Penertiban Pembuangan Sampah Di Kelurahan Sungai Jawi Dalam Pontianak Barat.” Skripsi Universitas Tanjungpura.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suharto, Edi. 2013. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 **Tentang Pengelolaan Sampah**

Tersiana, Andra. 2018. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Yogyakarta

Wahab, Solihin Abdul. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Jakarta: Buku Seru

Peraturan-Peraturan :

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 **Tentang Pengelolaan Sampah**
Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 16 Tahun 2015 **Tentang**

Retsibusi Jasa Umum

Peraturan Walikota Pontianak Nomor 61 Tahun 2016 **Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi,**

Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 **Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.**